



PUTUSAN
Nomor 206 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. NADIE YENEPI, tempat tinggal di Jalan Manunggal XV, RT III Nomor 08, Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pua Hardinata, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/P/II/2019/PLK, tanggal 27 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU, tempat kedudukan di Jalan W.A.D. Duha Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mastuari, S.IP., jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 312/600.62/SKK/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;

Termohon Kasasi I;

2. PT DIAH WAHYU PRATAMA, tempat kedudukan di Jalan Pramuka Komplek Semanda II Nomor 70 B, RT. 021 Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Fitra Faisal, jabatan Direktur;

Termohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 23/Mantaren I, tanggal 31 Januari 2019, Surat Ukur Nomor 982/2019 luas 19.950 m² (Meter Persegi), pemegang hak atas nama PT Diah Wahyu Pratama;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 23/Mantaren I, tanggal 31 Januari 2019, Surat Ukur Nomor 982/2019 luas 19.950 m² (Meter Persegi), pemegang hak atas nama PT Diah Wahyu Pratama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas;
3. Eksepsi gugatan Penggugat prematur dan Eksepsi *litis pendentis*;
4. Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat sumir/belum layak untuk diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksepsi kompetensi absolut pengadilan);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 28 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 302/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 16 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 302/B/2019/PT.TUN.JKT;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 23/Mantaren I tertanggal 31 Januari 2019 seluas 19.950 m² atas nama PT Diah Wahyu Pratama;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau) untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 23/Mantaren I tertanggal 31 Januari 2019 seluas 19.950 m² atas nama PT Diah Wahyu Pratama;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkatan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2020 dan 30 Januari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perselisihan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan hak atas tanah, khususnya antara Penggugat yang menyatakan telah membeli tanah secara sah dengan mecicil dari Omoy S Luwuk, sedangkan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 23/Mantaren I, tanggal 31 Januari 2019 seluas 19.950 m² atas nama PT Diah Wahyu Pratama diterbitkan secara sah berdasarkan penyerahan hak dari ahli waris Omoy S Luwuk;
- Bahwa untuk memberikan penyelesaian yang adil dan menyeluruh bagi para pihak dalam sengketa *in casu*, maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang lebih berhak atas tanah *a quo*;
- Bahwa pokok perselisihan mengenai sengketa kepemilikan atau hak secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum, dan sengketa kepemilikan atau hak antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau tetapi belum terdapat putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping adanya perbaikan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya juga harus diperbaiki mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. Nadie Yenepi harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 302/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 16 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 28 Agustus 2019 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. NADIE YENEPI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 302/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 16 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 28 Agustus 2019 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)